

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Deskripsi Teoritis**

Deskripsi teoritis dalam penelitian ini merupakan landasan teori sebagai syarat terlaksananya penelitian. Adapun landasan teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1 Tinjauan Sikap Nasionalisme dan Patriotisme**

Nasionalisme dan patriotisme merupakan faham kebangsaan yang harus terus kita bina danlestarikan di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. Dengan kedua faham tersebut perbedaan dalam keanekaragaman bangsa dilebur dalam satu-kesatuan yang utuh dengan perasaan senasib sepenanggungan. Berikut dijabarkan secara terperinci tentang sikap nasionalisme dan patriotisme.

##### **2.1.1.1 Pengertian Sikap**

Sikap merupakan tingkatan kecenderungan yang bersifat positif maupun negatif, yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi : simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2000) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi (*disposition to react*) secara positif (*favorably*) atau secara negatif (*unfavorably*) terhadap obyek tertentu. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa

sikap merupakan organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu.

Sedangkan La Pierre dalam Azwar (2003) memberikan definisi sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Lebih lanjut Soetarno (1994) memberikan definisi sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu artinya tidak ada sikap tanpa obyek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain.

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian sikap, tetapi berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.

Proses belajar sosial terbentuk dari interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah:

1. pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut

melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Kebudayaan. B.F. Skinner dalam Azwar (2003) menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, ganjaran) yang dimiliki. Pola *reinforcement* dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.
3. Orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu bersikap konformis atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
4. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam mempersepsikan dan menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.
5. Institusi Pendidikan dan Agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral

dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.

6. Faktor emosi dalam diri. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih tahan lama. contohnya bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka.

#### **2.1.1.2 Macam-macam Sikap Ilmiah Seorang Peneliti:**

Macam-macam sikap ilmiah seorang peneliti- sikap ilmiah yang dimaksud adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti. Untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula, peneliti harus memiliki sifat-sifat berikut ini.

##### **1. Mampu Membedakan Fakta dan Opini**

Fakta adalah suatu kenyataan yang disertai bukti-bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan opini adalah pendapat pribadi dari seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga di dalam melakukan studi kepustakaan, seorang peneliti hendaknya mampu membedakan antara fakta dan opini agar hasil penelitiannya tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **2. Berani dan Santun dalam Mengajukan Pertanyaan dan Argumentasi**

Peneliti yang baik selalu mengedepankan sifat rendah hati ketika berada dalam satu ruang dengan orang lain. Begitu juga pada saat bertanya, berargumentasi, atau mempertahankan hasil penelitiannya akan senantiasa menjunjung tinggi sopan santun dan menghindari perdebatan secara emosi. Kepala tetap dingin, tetapi tetap berani mempertahankan kebenaran yang diyakininya karena yakin bahwa pendapatnya sudah dilengkapi dengan fakta yang jelas sumbernya.

## **3. Mengembangkan Keingintahuan**

Peneliti yang baik senantiasa haus menuntut ilmu, ia selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya, tidak ingin ketinggalan informasi di segala bidang, dan selalu berusaha mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin canggih dan modern.

## **4. Kepedulian Terhadap Lingkungan**

Dalam melakukan penelitian, peneliti yang baik senantiasa peduli terhadap lingkungannya dan selalu berusaha agar penelitian yang dilakukannya membawa dampak yang positif bagi lingkungan dan bukan sebaliknya, yaitu justru merusak lingkungan. Semua usaha dilakukan untuk melestarikan lingkungan agar bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

## **5. Berpendapat secara Ilmiah dan Kritis**

Pendapat seorang peneliti yang baik selalu bersifat ilmiah dan tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di

samping itu, peneliti juga harus kritis terhadap permasalahan yang terjadi dan berkembang di sekitarnya.

#### **6. Berani Mengusulkan Perbaikan Atas Suatu Kondisi dan Bertanggung Jawab terhadap Usulannya**

Peneliti yang baik senantiasa berani dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus dihadapinya jika sudah mengusulkan sesuatu. Usulan tersebut selalu diembannya dengan baik dan dilaksanakan semaksimal mungkin, kemudian diwujudkannya dalam bentuk nyata sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh orang lain.

#### **7. Bekerja Sama**

Dalam kehidupan sehari-hari, peneliti yang baik mampu bekerja sama dengan orang lain dan tidak individualis atau mementingkan diri sendiri. Ia meyakini bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga keberadaannya senantiasa diharapkan oleh orang lain.

#### **8. Jujur terhadap Fakta**

Peneliti yang baik harus jujur terhadap fakta dan tidak boleh memanipulasi fakta demi kepentingan penelitiannya karena penelitian yang baik harus berlandaskan pada studi kepustakaan yang benar agar kelak jika orang lain melakukan penelitian yang sama, didapatkan hasil yang sama pula. Apa pun fakta yang diperolehnya, ia harus yakin bahwa itulah yang sebenarnya.

#### **9. Tekun**

Sebuah penelitian kadang kala memerlukan waktu yang pendek untuk menghasilkan sebuah teori, tetapi kadang kala memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Seorang peneliti yang baik harus tekun dalam penelitian yang dilakukannya, tidak boleh malas, mudah jenuh, dan

ceroboh, juga harus rajin, bersemangat, serta tidak mudah putus asa. Dengan demikian, ia akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

### **2.1.1.3 Pengertian Nasionalisme**

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali dkk., 1994: 89), kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata bangsa di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar (ibid, 1994: 970).

Kata bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian antropologis-sosiologis dan pengertian politis. Menurut pengertian antropologis-sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat.

Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah negara dan sebaliknya satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara. Kasus pertama terjadi pada negara yang memiliki beragam suku bangsa, seperti Amerika Serikat yang menaungi beragam bangsa yang berbeda. Kasus kedua adalah sebagaimana yang terjadi pada bangsa Korea yang terpecah menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara dalam pengertian politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa (nation) dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme (NurdalamYatim,2001:5758).

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah nasionalis dan nasional, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “lahir di”, kadangkala tumpang tindih



dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, etnik. Namun istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik (Riff, 1995: 193—194). Disamping definisi bahasa diatas terdapat beberapa rumusan lain mengenai nasionalisme, diantaranya:

1. Huszer dan stevenson  
Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.
2. L.Stoddard  
Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, yang dianut oleh sejumlah besar individu sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa.
3. Hans Kohn  
Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi. (Yatim,2001:58)

Beberapa definisi diatas memberi simpulan bahwa nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Kesadaran yang mendorong sekelompok manusia untuk menyatu dan bertindak sesuai dengan kesatuan budaya (nasionalisme) oleh Ernest Gellner dinilai bukanlah kebangkitan kesadaran diri suatu bangsa namun ia adalah pembikinan bangsa-bangsa yang sebenarnya tidak ada (Gellner dalam Anderson, 2002:9).

Dengan gaya berpikir antropologis, Anderson (2002:8-11) menawarkan pandangan yang lebih positif tentang nasionalisme, ia menyatakan bahwa bangsa

atau nation adalah komunitas politis dan dibayangkan (*imagined*) sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Lebih jauh beliau memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas karena ia sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk-mendalam dan melebar-mendatar, sekalipun ketidakadilan dan penghisapan hampir selalu ada dalam setiap bangsa. Bangsa disebut sebagai komunitas terbayang (*imagined community*) karena para anggota bangsa terkecil tidak mengenal sebagian besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka.

Ia dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena bangsa-bangsa yang paling besar sekalipun memiliki garis-garis batas yang pasti dan jelas meski terkadang bersifat elastis. Di luar garis batas itu adalah bangsa lain yang berbeda dengan mereka. Dalam sejarah, nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa dalam pengertian nation-state dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman (Dault, 2005: 4). Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Perjanjian Baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti para pastor, uskup, dan kardinal. Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh

Johann Gothenberg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan.

Hal ini penting dicatat mengingat pada sekitar tahun yang sama (1518-1521) Majapahit mengalami kehancuran yang disebabkan oleh pemberontakan daerah-daerah dan kemerosotan internal kerajaan. Majapahit pada masanya merupakan kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah yang saat itu disebut Nusantara. Namun kebesaran ini tidak memunculkan kesadaran berbangsa, dalam arti modern. Hal itu disebabkan tidak adanya alat percetakan yang mengakselerasi penyadaran massal seperti yang terjadi di Jerman. Namun demikian, nasionalisme Eropa yang pada kelahirannya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan self interest dan bukan atas kemanusiaan (Rasyidi dalam Yatim, 2001: 63). Dalam perkembangannya nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan penjajahan terhadap negeri-negeri yang saat itu belum memiliki identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Fakta ini merujuk pada dua hal: (1) ledakan ekonomi Eropa pada masa itu yang berakibat pada melimpahnya hasil produksi dan (2) pandangan pemikir Italia, Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya. Dia menulis: “Bila ini merupakan masalah yang mutlak mengenai kesejahteraan bangsa kita, maka janganlah kita menghiraukan keadilan atau ketidakadilan, kerahiman dan ketidakrahiman, pujian atau penghinaan, akan tetapi dengan menyisihkan

semuanya menggunakan siasat apa saja yang menyelamatkan dan memelihara hidup negara kita itu” (Kohn dalam Yatim, 2001: 65).

“Nasionalisme yang pada awalnya mementingkan hak-hak asasi manusia pada tahap selanjutnya menganggap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel. Dia berpendapat bahwa kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara-masyarakat, karena ia merupakan kepentingan obyektif sementara kepentingan masing-masing individu adalah kepentingan subyektif. Negara adalah ideal (*geist*) yang diobyektifikasi, dan karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam negara. Lebih jauh dia menyatakan bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, serta apa yang baik dan apa yang destruktif”. (Simandjuntak, 2003:166).

Hal ini melahirkan kecenderungan nasionalisme yang terlalu mementingkan tanah air (patriotisme yang mengarah pada *chauvinisme*), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah dunia lain. Absolutisme negara dihadapan rakyat memungkinkan adanya pemimpin totaliter, yang merupakan bentuk ideal negara yang dicitakan Hegel, sebuah monarki (ibid, 2003:224). Totaliterianisme yang dianjurkan oleh filsafat negara Hegel dapat menggiring sebuah pemerintahan menjadi pemerintahan yang fasis.

Fasisme adalah doktrin yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap perintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Dalam sejarahnya, fasisme terkait erat dengan rasisme yang mengunggulkan sebagian ras (suku) atas sebagian yang lain. Menurut Hugh Purcell (2000:11) nasionalisme dan rasisme merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme pada tahun 1930-an. Rasisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Keduanya berbeda pada penekanan. Rasisme menekankan

superioritas suku dan nasionalisme menekankan keunggulan bangsa (komunitas terbayang yang lebih besar dari suku). Manusia nasionalis adalah seseorang dengan kebanggaan terhadap bangsanya yang kadang diungkapkan dengan cara berlebihan. Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang secara alamiah melekat pada setiap manusia. Yang pertama kebanggaan terhadap bangsa sistem pemerintahan, suku, dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku. Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

### **1. Unsur-Unsur Nasionalisme**

Semangat kebangsaan (nasionalisme) yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Perasaan nasional

- 2) Watak nasional
- 3) Batas nasional (pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu ).
- 4) Bahasa nasional
- 5) Peralatan nasional
- 6) Agama

## **2. Timbulnya Nasionalisme**

Nasionalisme muncul dibelahan negara-negara dunia. Akan tetapi, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda. Nasionalisme Eropa muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Munculnya paham rasionalisme dan romantisme
- 2) Munculnya paham aufklarung dan kosmopolitanisme.
- 3) Terjadinya revolusi Prancis.
- 4) Reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte.

Nasionalisme Asia muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau.
- 2) Imperialisme
- 3) Pengaruh paham revolusi Prancis.
- 4) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia.
- 5) Piagam *Atlantic charter*.
- 6) Timbulnya golongan terpelajar.

## **3. Tujuan Nasionalisme**

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- 2) Menghilangkan Ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

#### **4. Akibat Nasionalisme**

Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah sebagai berikut.

- 1) Timbulnya negara nasional ( *national state* )
- 2) Peperangan
- 3) Imperialisme
- 4) Proteksionisme
- 5) Akibat sosial

#### **5. Faktor Pendorong Munculnya Nasionalisme di Indonesia**

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam ( intern ) dan faktor dari luar ( ekstern ). Faktor intern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
- 2) Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan
- 3) Pengaruh golongan peranakan
- 4) Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Fahaman-fahaman modern dari Eropa ( liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme )
- 2) Gerakan pan-islamisme
- 3) Pergerakan bangsa terjajah di Asia
- 4) Kemenangan Rusia atas Jepang

## 6. Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme kewarganegaraan (atau *nasionalisme sipil*) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”.

- 1) Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.
- 2) Nasionalisme romantic (juga disebut *nasionalisme organik*, *nasionalisme identitas*) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara *semulajadi* (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik.
- 3) Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya.
- 4) Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik



adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri.

- 5) Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan.

## **7. Makna Nasionalisme**

Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi nasionalisme dapat diartikan :

- a. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana

mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme

- b. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

#### **2.1.1.4 Pengertian Patriotisme**

Patriotisme berasal dari kata “Patriot” dan “isme” (bahasa Indonesia) yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. “Patriotism” (bahasa Inggris), yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan Negara.

Patriotisme adalah perasaan cinta tanah air dengan sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa dan negaranya. Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasa cinta pada tanah air
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- 3) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- 4) Berjiwa pembaharu
- 5) Tidak mudah menyerah

Konsep patriotik tidak selalu terjadi dalam lingkup bangsa dan negara, tetapi juga dalam lingkup sekolah dan desa atau kampung. Kita mungkin menemukan

seorang siswa atau masyarakat berbuat sesuatu yang mempunyai arti sangat besar bagi sekolah atau bagi lingkungan desa atau kampung.

### **1. Ciri-ciri Patriotisme**

Ciri-ciri patriotisme diantaranya adalah :

- 1) cinta tanah air;
- 2) menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan individu;
- 3) tidak kenal menyerah;
- 4) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

### **2. Bentuk Patriotisme**

Bentuk-bentuk patriotisme sebagai berikut :

- 1) Patriotisme Buta (*Blind Patriotism*) : keterikatan kepada bangsa dan negara tanpa mengenal toleran terhadap kritik, seperti dalam ungkapan : “right or wrong is my country” (benar atau salah, apapun yang dilakukan bangsa harus didukung sepenuhnya).
- 2) Patriotisme Konstruktif (*Constructive Patriotisme*) : keterikatan kepada bangsa dan negara dengan tetap menjunjung tinggi toleran terhadap kritik, sehingga dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama.

Perwujudan sikap patriotisme dapat dilaksanakan pada Masa Darurat (Perang)

Sikap patriotism pada masa darurat (perang) dapat diwujudkan dengan cara mengangkat senjata, ikut berperang secara fisik melawan penjajah, menjadi petugas dapur umum, petugas logistik, menolong yang terluka, dsb. Masa Damai

(Pasca kemerdekaan) : Sikap patriotism pada masa damai dapat diwujudkan dengan cara : menegakkan hokum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan, dsb. Semangat kebangsaan (Nasionalisme dan Patriotisme) dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar dengan cara melalui :

- a) Keteladanan;
- b) Pewarisan;
- c) Ketokohan.

### **3. Manfaat Sikap Patriotisme dalam Pendidikan**

Kita tahu patriotisme merupakan wujud sikap cinta tanah air. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyentuh aspek jiwa pada pelajar. Patriotisme membawa kemajuan bangsa apalagi dalam bidang pendidikan. Sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan hal yang sangat penting. Karena akan membawa kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

Membangun Sikap Patriotisme pada anak melalui pendidikan diharapkan dapat mendidik sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak dini agar memiliki jiwa patriotisme. Sebab jika kita menghayati dan memahami diri sebagai bagian dari bangsa kita perlu merenungkan bagaimana dapat menghentikan dan menyelamatkan bumi dan tanah air kita dari kehancuran. Sebab karena kelemahan dari sebagian masyarakat kita telah menyebabkan kehilangan banyak hal. Untuk itulah mulai sekarang kita harus berbenah diri, berusaha dan berjuang. Program ini harus ditanamkan pada anak sejak dini.

Dengan menanamkan sikap tersebut sejak dini generasi penerus kita mampu bertindak sesuai dengan nuraninya dan mampu membangun bangsa tanpa tergantung pada bangsa lain. Mengingat pentingnya hal tersebut sehingga harus diajarkan pada anak sejak usia dini. Sebab pendidikan yang diberikan pada anak sejak dini dapat memberikan dasar pengetahuan secara spiritual, emosional, dan intelektual dalam mencapai potensi yang optimal. Jika pendidikan sudah diberikan dengan tepat sesuai dengan bakat dan lingkungan peserta maka lima atau sepuluh tahun ke depan negara kita akan memiliki aset SDM yang berkualitas dan tangguh sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain dan memiliki keunggulan.

#### **4. Permasalahan Patriotisme Siswa**

Mengenai sikap patriotisme siswa masih sangat minim. Gambaran ini tercermin dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan siswa, sebagai berikut :

1. masih banyak siswa yang bolos sekolah.
2. Banyak yang tidak mencintai produk dalam negeri.
3. Coretan-coretan kotor dimana-mana yang merusak keindahan lingkungan.
4. Masih ada yang tidak mentaati peraturan sekolah.
5. Membuang sampah sembarangan.
6. Perkelahian antar pelajar

Semua patut prihatin dengan keadaan tanah air yang semakin hari – semakin berkurang sikap patriotismenya, yang sebenarnya dapat di atasi dengan langkah atau tindakan yang sifatnya menyuluruh. Yang paling utama dari dalam diri sendiri yang punya keinginan untuk merubahnya.

Usaha – Usaha yang dapat dilakukan pihak sekolah untuk memperbaiki pola pikir siswa tentang sikap patriotisme :

1. melestarikan budaya bangsa (seperti : melakukan upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari penting)
2. Melaksanakan *study tour* ke museum yang berisi sejarah tentang patriotisme atau kepahlawanan.
3. Membudidayakan buang sampah pada tempatnya dan tepat waktu datang ke sekolah .
4. Melestarikan Budaya Malu : Bila terlambat ,bila tidak mengerjakan tugas.

## **2.1.2 Persepsi Siswa Kompetensi Pedagogik Guru PKn**

### **2.1.2.1 Tinjauan Tentang Pengertian Persepsi**

Menurut Bimo Walgito (1993:53) “Persepsi adalah merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan , yang merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus melalui alat reseptornya ”. Yang dimaksud proses disini adalah kemampuan untuk membeda-bedakan antara benda satu dengan yang lainnya, mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa serta dapat mefokuskan perhatiannya pada suatu objek.

Rakhmat (1991:51) berpendapat bahwa ”persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi, menafsirkan makna inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga etensi, ekspektasi motivasi dan memori”. Pengalaman akan muncul

sebagai akibat tanggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu objek, yang dipengaruhi pengenderaannya, lingkungan, pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan makna sebagai hasil dari pengamatan.

Menurut MC Mahon dalam Isbandi Rukminto Adi (1994:105) persepsi adalah proses menginterpretasikan rangsangan input dengan menggunakan alat penerima informasi. Persepsi termasuk proses berpikir untuk memberikan penilaian kepada sesuatu yang dapat di pengaruhi melalui jalur formal mau pun non formal. persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor- faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kaca matanya sendiri yang di warnai oleh nilai diri kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman; proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut”.

Persepsi termasuk proses berpikir untuk memberikan penilaian kepada sesuatu yang dapat di pengaruhi melalui jalur formal mau pun non formal. Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuannya masing-masing individu tentang objek tersebut.

Pengertian tersebut diatas didukung oleh Morgan, King dan Robinson dalam Isbandi Rukminto Adi (1994:105) “persepsi menunjuk pada bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap dan mencium dunia sekitar kita,

dengan kata lain persepsi dapat pula didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dialami manusia.”

Didukung pula oleh pendapat Milliam James dalam Isbandi Rukminto Adi (1994:105) menyatakan bahwa “persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang di serap oleh indera kita,serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu pandangan atau tanggapan individu terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar atau sosialisasi pengetahuan dan cakrawala individu tentang objek tertentu dalam rangka menafsirkan sesuatu dengan menggunakan alat penerima informasi misalnya melihat,mendengar,merasakan,mengecap dan mencium.

### **1. Faktor-faktor Persepsi**

Persepsi setiap individu dalam menilai sesuatu akan berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhui, diantaranya yaitu:

- a. faktor pengetahuan
- b. faktor pengalaman
- c. faktor cakrawala atau wawasan
- d. faktor proses belajar

### **2. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi**

Menurut Bimo Walgito (1993:54) seseorang dapat mengadakan persepsi bila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:



1. Adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indri atau reseptor. Stimulus yang datang dari luar langsung mengenai alat indra (reseptor), dapat datang dari dalam yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indra reseptor yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus disamping itu harus ada pula syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang di terima reseptor ke pusat susunan, syarat yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat mengadakan respon di perlukan saraf motorik.
3. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula perhatian yang merupakan langkah-langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

### **3. Hal-hal Yang Mempengaruhi Persepsi**

Suatu objek dapat dipersiapkan secara berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain. Menurut Sarlito Wirawan (2002:13-14) hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu:

1. Perhatian yaitu biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian terhadap satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Set yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang pelari yang akan melakukan start terhadap set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saatharus memulai.

3. Kebutuhan: kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai: sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi orang tua tersebut.
5. Ciri kepribadian: Misalnya A & B bekerja di sebuah kantor, si A seseorang yang penakut akan mempersiapkan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si B yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai seorang yang bisa diajak bergaul seperti yang lain.

Gangguan kejiwaan, hal ini menimbulkan kesalahan persepsi yang di sebut dengan halusinasi. (Sarlito:1983:44).

#### **2.1.2.2 Pengertian Kompetensi**

Kompetensi secara umum kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Secara bahasa kompetensi berasal dari kata *kompetency* yang berarti memiliki kemampuan dan kecakapan, hal ini sesuai dengan penjelasan A.Dahlan bahwa kompetensi memiliki makna kecakapan, kewenangan, kekuasaan, kemampuan. Sedangkan pengertian kompetensi secara mendasar adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi menurut usman dikutip oleh Kunandar adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi akan menjadi karakteristik seseorang yang paling menonjol dan berhubungan dengan kinerja dengan suatu pekerjaan dan situasi tertentu.

R.M Gunion yang dikutip oleh Hamzah B . Uno mendefinisikan kemampuan atau kompetensi atau kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang

cara-cara berperilaku atau berfikir dalam segala situasi dan berlangsung terus-menerus dalam periode waktu yang lama. Menurut Lefrancois yang dikutip oleh Jamal A. Asmani mengatakan bahwa kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar.

Dari kedua pendapat di atas dapat difahami kompetensi merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dapat diketahui dari pola pikir, sikap dan perilakunya yang dapat diperoleh dari berbagai kegiatan. Hal ini tergabung dalam istilah UU No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 10 disebutkan “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Secara lebih lengkapnya kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/4/2002 menyebutkan “kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu”.

Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Menurut *broke* dan *stone*, kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak. Kompetensi merupakan gambaran hakikat dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.

Dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian diatas, kompetensi guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dalam melaksanakan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki kemampuan atau kompetensi yang beraneka ragam.

Persyaratan profesional diantaranya :

1. Menuntut adanya keterampilan
2. Menekankan pada suatu keahlian bidang tertentu
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari profesinya
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan
6. Memiliki kode etik
7. Memiliki objek layanan yang tetap yaitu peserta didik
8. Diakui oleh masyarakat

Atas dasar persyaratan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa jabatan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan tersebut.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Kompetensi Guru**

Kompetensi guru profesional mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Berikut akan diuraikan lebih jauh tentang kompetensi-kompetensi tersebut.

### **1. Kompetensi pedagogik**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap evaluasi didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Disini ada 4 subkompetensi yang harus diperhatikan guru, yaitu memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan mengembangkan peserta didik.

Sementara itu, merancang pembelajaran dimaksudkan guru harus mampu membuat RPP dan kemudian bisa mengaplikasikan rancangan itu dalam proses pembelajaran sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Di samping itu guru harus mampu melakukan evaluasi. Mengembangkan peserta didik bermakna bahwa guru mampu memfasilitasi peserta didik di dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimilikinya.

### **2. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi Kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia. Subkompetensi mantap dan stabil memiliki indikator yang esensial yaitu : bertindak sesuai hukum, norma sosial, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak dan bertutur.

Guru dewasa akan menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja yang tinggi. Guru yang arif akan mampu melihat manfaat pembelajaran bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat, menunjukkan sikap terbuka dalam berfikir

dan bertindak. Berwibawa mengandung makna bahwa guru memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan perilaku yang disegani.

Yang paling utama dalam kepribadian guru adalah berahlak mulia, ia dapat menjadi teladan bertindak sesuai norma agama (iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong serta memiliki perilaku yang dapat dicontoh).

### **3. Kompetensi Profesional**

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Guru harus memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar.

Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait dan menerapkan skonsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi.

### **4. Kompetensi Sosial**

Kompetensi Sosial merupakan pendidik sebagai bagian dari masyarakat, untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan masyarakat sekitar. Guru tidak bisa bekerja sendiri tanpa memperhatikan lingkungannya. Ia harus sadar sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat akademik tempat ia mengajar maupun dengan masyarakat luas. Ia harus memiliki

kepekaan lingkungan dan secara terus menerus berdiskusi dengan teman sejawat dalam memecahkan persoalan pendidikan.

Guru yang jalan sendiri tidak akan berhasil apalagi kalau dia menjaga jarak dengan peserta didik. Dia harus sadar bahwa interaksi guru dengan siswa mesti terus dihidupkan agar suasana belajar hangat dan harmonis. Keempat kompetensi di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing bukanlah hal yang berdiri sendiri.

#### **2.1.2.4 Kompetensi Pedagogik Guru**

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Setelah kita mempelajari pengertian di atas perihal kompetensi guru beserta pembagian kompetensi guru ke dalam beberapa kategori pokok memudahkan kita untuk mengetahui dan membedakan kompetensi ideal yang harus dimiliki guru.

Pedagogik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yakni *paedos* dan *agogos*. *Paedos* artinya anak laki-laki, sedangkan *agogos* artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki zaman Yunani kuno yang pekerjaannya yang mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah.

Kemudian secara kiasan pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Pengertian ini hampir sama dengan pendapat Prof. Hoogveld yang dikutip oleh Uyoh Sadulloh mendefinisikan bahwa pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari membimbing anak ke arah tujuan tertentu, supaya ia kelak mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.

Dari uraian di atas dapat dapat disimpulkan Kompetensi Pedagogik secara spesifik adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran disertai dengan akhlak yang baik, menguasai pembelajaran dan mengembangkam kompetensi pedagogiknya melalui interaksi yang baik, dapat memotivasi siswa, tanpa kekerasan dan adanya sikap saling menghargai.

Penjelasan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Untuk lebih memahami cakupan kompetensi Pedagogik guru dalam proses pembelajaran menurut Dirjen PMPTK akan dijelaskan sebagai berikut:

**a. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan**

Perkembangan secara lebih lanjut seorang pedidik harus menguasai sub bidang ilmu pengetahuan yang relevan dengan pendidikan saat ini. Pamahaman atau wawasan pendidikan meliputi :

- a. Memahami kebijakan pendidikan
- b. Memahami perkembangan peserta didik
- c. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran
- d. Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan
- e. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan



### **b. Pemahaman karakteristik peserta didik**

Karakteristik yang berbeda-beda harus dipahami oleh guru sebagai tenaga profesional kependidikan. Perbedaan individual berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, keadaan individual harus dimengerti oleh guru dalam upaya pembelajaran.

Sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami dari peserta didiknya yaitu, tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Anak cerdas memiliki usia mental lebih tinggi dari usianya, dan mampu mengerjakan untuk anak yang usianya lebih tinggi. Secara umum guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Kondisi fisik antara lain ; berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, dan lumpuh karena kerusakan otak.

### **c. Pengembangan Kurikulum atau Silabus**

Menurut Robert S yang dikutip oleh Elaine B. Johnson kurikulum merupakan sistem sosial yang berujung pada sebuah rencana untuk pengajaran. Sedangkan panduan lengkap KTSP menjelaskan bahwa “ kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Meliputi tujuan pendidikan nasional dan kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah pendidikan dan peserta didik.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau kelompok mata pelajaran dan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi

pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar.

#### **d. Rancangan Rencana Pembelajaran**

Rencana pembelajaran merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam implementasi KTSP dalam proses belajar mengajar. karena pelaksanaan yang baik dapat menentukan kualitas pembelajaran secara menyeluruh dan menentukan kualitas pembelajaran pendidikanserta menentukan kualitas Sumber Daya Manusia., baik masa sekarang maupun masa depan. Sehingga, perencanaan pembelajaran harus dibuat sempurna.

E. Mulyasa menjelaskan bahwa RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang apa yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Pada dasarnya ada dua fungsi RPP yaitu :

##### 1) fungsi perencanaan

Dengan adanya RPP diharapkan dapat mendorong guru lebih siap melaksanakan pembelajaran karena sudah memiliki perencanaan yang matang.

##### 2) Fungsi pelaksanaan

Guru harus menyusun RPP secara sistematis dan sistematis, utuh dan menyeluruh. Dalam pelaksanaannya RPP memiliki beberapa prinsip pengembangan yang harus diperhatikan oleh guru dalam penyusunan RPP:

- a. Kompetensi yang dimasukkan dalam RPP harus jelas, makin jelas kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.

- b. Rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

**e. Pelaksanaan Pembelajaran**

Guru dituntut dapat membangkitkan semangat belajar siswa. Wina Sanjaya menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran efektif jika guru :

- (1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai,
- (2) Membangkitkan minat siswa,
- (3) Terciptanya suasana yang menyenangkan dalam belajar,
- (4) Ciptakan persaingan dan kerjasama.

**f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran**

Mempermudah penyampaian materi pembelajaran guru dituntut agar dapat menguasai berbagai macam teknologi pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Fasilitas pendidikan berbasis teknologi pada umumnya mencakup sumber belajar, baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan jalan perkembangan teknologi

**g. Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pembentukan perilaku peserta didik, dapat dilakukan dengan cara :

a. Penilaian kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir.

b. Tes kompetensi dasar

Tes kompetensi dasar dilakukan untuk mengetahui kompetensi membaca , menulis, berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran ( program remedial ). Tes kemampuan dasar pada setiap tahun akhir kelas III.

c. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

setiap akhirsemester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu dan juga sebagai ukuran keberhasilan dalam mengajar.

d. Penilaian Program

penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

**h. Pengembangan peserta didik**

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki peserta didik. Pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling.

**2.1.3 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah

maupun pendidikan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan kewarganegaraan atau Civics menurut Stanley E. Dimond & Elmer F. Pliger adalah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warganegara. Menurut Somantri (2001: 159), mendefinisikan PKn sebagai berikut Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara indonesia yang cerdas, trampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Modul Kapita Selekt PKn (2006:7) Pengertian PKn adalah Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia,

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budipekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warganegara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warganegara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi, pada dasarnya mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wahana untuk dapat menciptakan manusia Indonesia yang memiliki perilaku yang mencerminkan nilai luhur Pancasila.

a) Visi mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan

Adalah mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian warganegara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadib landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia dan demokratis. ( Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).

b) Misi Mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan

Mengembangkan kerangka berfikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warganegara yang demokratis.

Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi Indonesia. (Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).

Jadi dari penjelasan di atas hakekat PKn merupakan suatu upaya untuk mengartikan dan menyalurkan dan membina peran warganegara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warganegara yang baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. PKn juga memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warganegara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

#### **2.1.3.1 Tujuan**

Mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut ;

- 1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencatutan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi. ( Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).

### **2.1.3.2 Fungsi**

Pada bagian yang lain dalam modul Diagnostik Kesulitan Belajar (1984) Disebutkan juga Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan adalah:

- 1) Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jatidiri sebagai Bangsa Indonesia, yang Merdeka bersatu dan berdaulat.
- 2) Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warganegara dengan negara antar warga negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara.



Seperti halnya mata pelajaran lainnya, pada mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dalam Modul Kapita Selekta PKn (2006 : 4).

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Dalam Ilmu Pendidikan Sosial  
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship tranmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya.

Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai Suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatan terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranataputra, 2007: 89).

Salah satu masalah yang terkait dengan penerapan esensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial contohnya mata pelajaran kewarganegaraan adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dan munculnya arogansi kesukuan dan golongan yang merusak sendi-sendi demokratisasi.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia dalam persaingan

global dan memudarnya integrasi nasional, maka diperlukan sosialisasi hasil kajian esensi pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi bagaimana pembelajarannya agar mampu memperkuat revitalisasi nasionalisme Indonesia menuju *character and nation building* sebagai tumpuan harapan pendidikan masa depan. Juga dapat memperkuat kembali komitmen kebangsaan yang selama ini mulai memudar dengan tekad memperjuangkan bangsa Indonesia yang berkualitas dan bermartabat. Dengan demikian maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan moral bangsa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat.

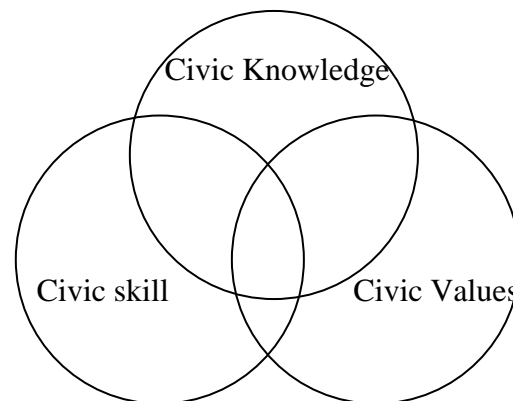
#### **2.1.3.1 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan (NKRI), dalam arti luas pendidikan adalah upaya pengembangan potensi warganegara pada tiga aspek yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan kecakapan hidup. Upaya mengembangkan ketiga aspek tersebut, dapat dirancang secara sistematis melalui mata pelajaran tertentu. Khusus yang berkaitan dengan masalah nasionalisme, hukum, konstitusi, politik, hak asasi manusia, demokrasi dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).

Komponen – komponen utama *Civic Education* yang bermutu diajukan oleh *Center for Civic Education* pada Tahun 1994 dalam *The National Standards for*

*Civics and Government* yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), Kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak/karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Sejalan dengan hal tersebut, telah berkembang wacana tentang paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa komponen pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara saling berkait satu sama lain. Dimensi Materi PKn.

Paradigma baru PKn menerapkan pola pikir baru dengan hasil belajar yang dimiliki siswa, hal ini dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2. 1: Dimensi Materi PKn  
Sumber : Depdiknas : 2003 : 2

Gambar 2.1 menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari tiga dimensi antara lain pengetahuan Kewarganegaraan (*civic Knowledge*) yang mencakup bidang Politik, hukum, dan moral. Dimensi ketrampilan Kewarganegaraan (*Civic skill*) meliputi ketrampilan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (*civic Values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara,

kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul serta perlindungan terhadap minoritas.

Dijelaskan pula bahwa seorang warga negara perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan terlebih dahulu, terutama pengetahuan bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara perlu memiliki keterampilan secara intelektual dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, hasil belajar berupa pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik, dengan memperlihatkan sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan, rasa kesetiakawanan.

Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan politik, hukum, moral dan pengembangan kecakapan. Oleh karena itu mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian antar disiplin, menggunakan pendekatan isomeristik yang tercermin dari ruang lingkup materi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi : Persatuan dan kesatuan, Norma hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warganegara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi.

Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Pembekalan materi akan membantu

siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang tentang hakekat kehidupan bermasyarakat .

### **2.1.3.2 Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn**

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu Negara, ilmu tata Negara, hukum sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan

warga negara

- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
- g. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

#### **2.1.4 Pengertian Konsep diri**

Ahli merumuskan definisi konsep diri, menurut Burns (1993:vi) konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan orang-orang lain berpendapat, mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu (Mulyana, 2000:7).

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa konsep diri yang dimiliki individu dapat diketahui lewat informasi, pendapat, penilaian atau evaluasi dari orang lain

mengenai dirinya. Individu akan mengetahui dirinya cantik, pandai, atau ramah jika ada informasi dari orang lain mengenai dirinya.

Sebaliknya individu tidak tahu bagaimana ia dihadapkan orang lain tanpa ada informasi atau masukan dari lingkungan maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung individu telah menilai dirinya sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri itu meliputi watak dirinya, orang lain dapat menghargai dirinya atau tidak, dirinya termasuk orang yang berpenampilan menarik, cantik atau tidak.

Seperti yang dikemukakan Hurlock (1990:58) memberikan pengertian tentang konsep diri sebagai gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep diri ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi dan prestasi.

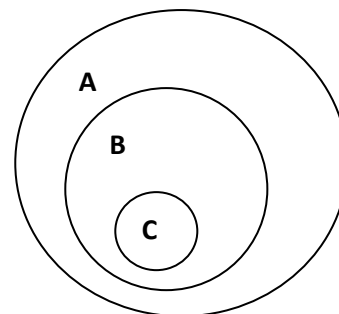
Menurut William D. Brooks bahwa pengertian konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita (Rakhmat, 2005:105). Sedangkan Centi (1993:9) mengemukakan *konsep diri (self-concept)* tidak lain tidak bukan adalah gagasan tentang diri sendiri, konsep diri terdiri dari bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana kita harapkan.

Konsep diri didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang meliputi kemampuan, karakter, maupun sikap yang dimiliki individu (Rini,

2002:16). Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa *pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya.* Peran konsep diri dari seseorang dalam berperilaku sangatlah penting, sebab konsep diri merupakan pusat dari perilaku seseorang. Untuk memperoleh gambaran tentang konsep diri, ada beberapa pandangan mengenai konsep diri yang dimaksud.

Combs dan Snygg dalam Burns (1993:45) mendefinisikan bahwa konsep diri seseorang merupakan pandangan dirinya sendiri dan titik pandang terhadap dirinya sendiri. Mereka mengungkapkan bahwa konsep diri disusun dari persepsi-persepsi bersangkutan dengan individunya. Dikatakan pula bahwa konsep diri merupakan bagian dari lapangan fenomenologi yang paling dalam. Hal ini tergambar pada gambar lapangan fenomenologi dari Combs dan snygg.

**Lapangan Fenomenologi  
Diri  
Konsep Diri**



Gambar.2.2 fenomenologi dari Combs dan snygg



Gambar diatas, menjelaskan bahwa konsep diri merupakan bagian terkecil dari persepsi. Dalam gambaran ini lapangan fenomenologi memiliki tiga bagian yaitu lapangan persepsi total yang termasuk didalamnya semua persepsi dari individu (lingkaran A), persepsi mengenai diri sendiri digambarkan pada lingkaran B, sedangkan lingkaran C yaitu persepsi hanya meliputi hal yang penting bagi individu tersebut. Dengan demikian Combs dan Snygg menyimpulkan bahwa konsep diri merupakan sebuah organisasi stabil dan berkarakter yang disusun dari persepsi-persepsi yang tampak bagi individu yang bersangkutan sebagai hal yang mendasar baginya.

Konsep diri (*self concept*) dalam teori kepribadian merupakan hal yang sering dibahas serta dianggap besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Penilaian tersebut merupakan keyakinan seseorang mengenai dirinya meliputi gambaran tentang fisik, psikis, social, dan prestasinya. Gambaran ini terbentuk berdasarkan persepsi orang lain terhadap dirinya. Selain itu konsep diri juga terbentuk berdasarkan pemikiran dan pengamatan emosional individu mengenai dirinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Burn dalam Slameto (1995:182) konsep diri adalah "*the self concept to the connention of attitudes and beliefs we hold about ourselves*" , konsep diri merupakan keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya. Konsep ini merupakan suatu kepercayaan mengenai keadaan diri sendiri yang relatif sulit diubah. Konsep ini tumbuh dari interaksi seseorang dengan orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya, seperti orang tua, guru, dan teman-temannya.

Selanjutnya Mead dalam Slameto menyebut konsep diri sebagai suatu produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman psikologis ini merupakan eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan refleksi dirinya sendiri yang diterima dari orang-orang yang berpengaruh pada dirinya sendiri. Calhaun (1990 :99) mengemukakan konsep diri adalah pandangan diri anda tentang anda sendiri yang meliputi pengetahuan anda tentang diri anda sendiri, pengharapan anda mengenai diri anda, dan penilaian tentang diri anda sendiri.

Sedangkan Brooks dalam Rakhmat (2004:99) mendefinikan konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri sendiri (persepsi diri). Persepsi diri tersebut dapat bersifat social, fisik, psikologis yang diperoleh dari pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Cawagas dalam Pudjiyogyanti (1991:2) menjelaskan bahwa konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisik, karakteristik pribadinya, kegagalannya dan sebagainya. Selanjutnya Symond dalam Suryasubrata (1986:292) member batasan tentang konsep diri sebagai cara-cara bagaimana seseorang beraksi terhadap dirinya sendiri. Self pada hakekatnya meliputi empat aspek yaitu: (a) bagaimana seseorang mengamati dirinya sendiri, (b) bagaimana seseorang berpikir tentang dirinya sendiri, (c) bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri, dan (d) bagaimana seseorang berusaha dengan berbagai cara untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri.

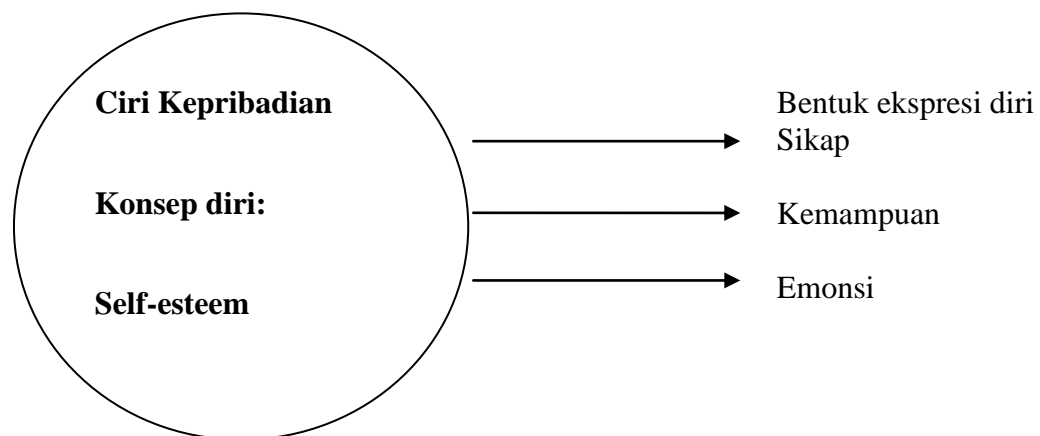
Setiap konsep diri mempunyai aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik: terdiri dari konsep yang dimiliki individu tentang penampilannya, kesesuaian dengan seknya, arti penting tubuhnya dalam hubungan dengan prilaku dan gengsi

yang diberikan tubuhnya dimata orang lain. Aspek psikologis terdiri dari konsep individu tentang kemampuan dan tidak mampunya, harga diri dan hubungannya dengan orang lain.

Selanjutnya Fahmi (1982:112) mengemukakan konsep diri adalah gambaran mental yang dibentuk tentang dirinya mempunyai tiga sisi, yang pertama khusus tentang ide yang diambil dari kemampuan dan kemungkinannya, boleh jadi gambaran tentang dirinya sebagai seorang yang mempunyai tempat memiliki kemampuan untuk belajar, dan mempunyai kekuatan jasmani. Dengan kata lain ia mampu untuk mencapai keberhasilan. Sisi kedua dari pengertian pribadi hubungan dengan pikiran orang tentang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Karena yang sangat mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya adalah cara orang lain memandangnya. Karena gambaran tiap orang tentang dirinya terbentuk dalam pandangan orang lain terhadap dirinya. Sisi yang ketiga pandangan orang lain yang seharusnya terhadap dirinya. Semakin kecil beda antara gambaran orang lain tentang dirinya secara nyata dengan pandangan atau gambaran ideal di angan-angan, semakin bertambah kematangan dan semakin dekat tercapainya gambaran tersebut. Temuan-temuan lain mengenai konsep diri ini dikemukakan oleh Rogers dalam Burns (1993:49) disimpulkan:

- 1) Konsep diri adalah organisasi dalam persepsi diri.
- 2) Konsep diri menjadi penentu yang penting dari respon terhadap lingkungan.
- 3) Perkembangan konsep diri tidak hanya merupakan pertumbuhan pengalaman yang lamban, persyaratan dan defenisi yang ditentukan orang lain.

Seorang sosiolog, Viktor Gecas dalam Kreitner (2000:162) mendefinisikan bahwa konsep diri (*self concept*) sebagai konsep yang dimiliki individu atas dirinya sendiri sebagai makhluk fisik, social dan spiritual atau moral. Dengan kata lain, karena Anda memiliki konsep diri, maka Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai manusia yang berbeda. Dalam model konseptual untuk mempelajari perbedaan individual dalam perilaku organisasi, ia membagi konsep diri menjadi tiga yaitu (1) penghargaan diri (*self-esteem*), (2) kemajuan diri (*self-efficacy*), dan (3) pemantauan diri (*self-monitoring*).



Gambar 2.3 Model konseptual untuk mempelajari perbedaan individual dalam perilaku organisasi.

Konsep diri teori kepribadian merupakan hal yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perilaku seseorang. Hal ini dapat dipahami karena konsep diri terbentuk berdasarkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman emosional individu mengenai dirinya sendiri. Dengan demikian konsep diri memiliki peran yang penting dalam menentukan perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri akan tampak dari perilakunya. Menurut Pudjjogyanti (1991:5), ada tiga alasan mengapa konsep diri berperan penting

dalam menentukan perilaku seseorang, yaitu (1) konsep diri mempunyai peranan dalam mempertahankan keselarasan batin (*inter concitency*), (2) seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi individu tersebut dalam menafsirkan pengalamannya, dan (3) konsep diri menentukan pengharapan individu.

Konsep yang merupakan pandangan atau sikap seseorang mengenai dirinya bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk karena interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan social dimana individu hidup. Lingkungan social pertama bagi setiap individu adalah keluarga, maka dari itu konsep diri terbentuk melalui interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Setiap kali melakukan interaksi individu itu akan menerima tanggapan, tanggapan itu merupakan cerminan bagi individu untuk menilai atau memandang dirinya sendiri. Dengan demikian konsep diri terbentuk karena proses interaksi individu dengan orang-orang sekitarnya. Apa yang dipersepsikan individu lain mengenai individu tidak terlepas dari struktur, peran, dan status social yang disandang oleh individu tersebut.

Berkenaan dengan dimensi konsep diri, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa konsep diri memiliki tiga dimensi, yaitu: 1) *pengetahuan diri*, yakni apa yang diketahui individu tentang dirinya, misalnya usia, jenis kelamin, kebangsaan pekerjaan, pendidikan, kegemaran, cita-cita dan sebagainya; 2) *pengharapan diri* (diri ideal atau cita-cita) yang merupakan kekuatan yang mendorong individu menuju masa depan dan memandu kegiatannya dalam perjalanan hidupnya; 3) *penilaian diri*, setiap individu selalu menilai dirinya sendiri baik berhubungan

dengan pengharapan ataupun cita-cita, hasil penilaian diri akan menumbuhkan penghargaan terhadap diri sendiri. Pandangan lain bahwa konsep diri memiliki tiga karakteristik yakni penilaian diri, penghargaan diri dan penerimaan diri.

Berbeda dengan pendapat diatas, ada pandangan yang menyatakan bahwa konsep diri terdiri dari empat yang meliputi: 1) citra diri, yakni apa yang didapat seseorang ketika melihat dirinya sendiri; 2) intensitas afektif, yakni seberapa kuat seseorang merasakan tentang berbagai segi sikapnya; 3) evaluasi diri, yakni apakah seseorang mempunyai pendapat yang menyenangkan atau tidak tentang bermacam-macam tingkah lakunya; 4) predisposisi tingkah laku; yakni apa yang kemungkinan besar diperbuat seseorang dalam memberi respon atas hasil evaluasi tentang dirinya. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa konsep diri terdiri dari enam bagian yaitu: 1) diri fisik, seksualitas, kesehatan dan penampilan diri; 2) diri etik moral yakni persepsi individu terhadap dirinya dari sudut etika moral yang berlaku di masyarakat serta penghayatan agama; 3) diri pribadi yang meliputi perasaan individu terhadap nilai pribadinya dan perasaan kecukupan sebagai pribadi; 4) diri keluarga; 5) diri social, yakni bagian diri individu yang menilai dirinya sendiri dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungan yang lebih luas; dan 6) kritik diri. Lebih lanjut pendapat lain menyatakan bahwa konsep diri terdiri dari tujuh dimensi yakni; 1) cita diri; 2) pengetahuan diri; 3) pengembangan diri; 4) penilaian diri; 5) kompetensi diri; 6) aspirasi dan tujuan; dan 7) rasa harga diri.

Pudjijogyanti (1991:6), menyatakan bahwa berdasarkan suatu kejaian terdapat pendapat yang berbentuk sebuah kesimpulan bahwa konsep diri terbentuk atas dua komponen, yaitu 1) komponen kognitif yakni pengetahuan individu akan dirinya

sendiri yang dapat membentuk gambaran diri dan cita-cita diri; 2) komponen afektif, yang merupakan penilaian individu terhadap dirinya, penilaian ini akan membentuk penerimaan terhadap diri dan harga diri.

Selain memiliki beberapa dimensi, beberapa ahli mengemukakan bahwa konsep diri dapat dikelompokkan atas konsep diri positif dan konsep diri negatif. Menurutnya konsep diri positif adalah penilaian seseorang secara positif terhadap dirinya sehingga ia dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya. Sebaliknya konsep diri negatif adalah seseorang yang menilai dirinya dengan penilaian negative yang dapat merusak konsep dirinya. Berkenaan dengan konsep diri positif dapat disamakan dengan evaluasi diri yang positif, penghargaan diri yang positif, dan penerimaan diri yang positif. Sedangkan konsep diri negative dapat disamakan dengan evaluasi diri yang negative, membenci diri, perasaan rendah diri, tidak adanya penghargaan diri dan penerimaan diri.

Berkenaan dengan konsep diri positif dan konsep diri negative ini pada individu, jika diamati bukanlah suatu yang ekstrem melainkan lebih berupa kecenderungan. Berdasarkan tanda-tanda yang dimiliki individu, dapat disimpulkan individu cenderung memiliki konsep diri positif atau konsep diri negative. Makin banyak ditemukan tanda-tanda konsep diri pada individu makin memudahkan kita untuk mengelompokkan konsep dirinya. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung bersikap positif dan begitu sebaliknya.

Berbagai pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri berupa pengetahuan diri,

penghargaan diri, dan penilaian diri yang meliputi diri fisik, diri etika moral, diri personal, diri keluarga, diri social, dan kritik diri. Bagaimana individu memandang dirinya, akan mempengaruhi tingkah lakunya. Konsep diri positif maupun konsep diri negative juga akan mengarahkan bagaimana individu bereaksi secara khas terhadap orang atau situasi serta menentukan kualitas prilakunya.

Konsep diri yang dimiliki seseorang akan turut menentukan bagaimana ia menerima, merasakan, dan merespon lingkungannya. Seorang yang berpikir bahwa dirinya kurang baik, maka ia akan menganggap remeh dirinya serta selalu membayangkan kegagalan disetiap tugasnya, selanjutnya ia enggan untuk mencoba mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Tingkah laku tersebut menunjukkan keyakinan bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya akan mendapatkan keberhasilan yang rendah. Hal ini menyebabkan pula orang tersebut tidak memiliki motivasi untuk mencapai hasil/prestasi yang tinggi. Sebaliknya seorang yang menilai dirinya positif, usahanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, berani memecahkan masalah. Orang yang memiliki konsep diri yang tinggi akan menunjukkan tingkat aspirasi yang tinggi, optimis, percaya diri, realistis, mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan diatas tampak banyak variasi pemahaman dari berbagai pendapat ahli terhadap makna konsep diri. Perbedaan ini hanya suatu nuansa, karena pada dasarnya semua tetap mengacu pada objek yang sama. Lagi pula perbedaan itu adalah wajar karena para ahli itu bertolak dari sudut pandang yang berbeda.



Pada dasarnya para ahli sependapat bahwa konsep diri merupakan objek yang dapat didekati oleh individu itu baik sudut kognitif (pengetahuan), afektif maupun konatif (karsa). Dalam aspek kognitif individu memahami dirinya sebagai sesuatu yang khas dan unik berbeda dengan individu yang lain. Dalam aspek afektif, individu merasakan dan menilai dirinya sebagai suatu objek yang didudukkan dalam suatu criteria atau norma tertentu. Sedangkan dalam aspek konatif, individu menginginkan atau mengharapkan terwujudnya suatu keadaan diri tertentu berdasarkan criteria atau referensi tertentu pula.

Pendapat para ahli itu pula dapat dirangkum bahwa konsep diri mencakup pikiran, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi dengan persepsi seseorang mengenai kualitas psikologis, fisik, dan social yang dimilikinya. Sumber terbentuknya konsep diri terdiri dari tiga hal yaitu (1) proses interaksi antar individu dengan lingkungan social terhadap dirinya, (2) apa yang menjadi milik pribadi orang itu baik bersifat fisik maupun psikologis, dan (3) upaya diri untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Ketiga factor ini dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau dapat terjadi dalam bentuk kombinasi yang akhirnya dapat membangun konsep diri orang tersebut.

Berdasarkan teori dan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri dalam penelitian ini adalah gambaran (pandangan) diri siswa tentang dirinya sendiri, mencakup kualitas psikologis yang dimilikinya yang berkaitan dengan aktivitas penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia. Konsep diri (self-concept) ini dapat diukur dari: (a) rasa percaya diri (self-confidence),

berhubungan dengan keyakinan seseorang akan kemampuannya, kecakapannya dan keterampilan yang dimilikinya dalam penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, (b) rasa bangga diri (*self esteem*) yang menunjukkan kepada kehormatan pribadi yang diharapkan yang dikaitkan dengan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, dan (c) upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri yang dikaitkan dengan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia.

#### **2.1.4.1 Komponen Konsep Diri**

Konsep diri dapat digambarkan dalam istilah rentang dari kuat sampai lemah atau dari positif sampai negatif. Bergantung kepada kekuatan individu dari keempat komponen konsep dirinya.

##### **1. Identitas**

Identitas mencakup rasa internal tentang individualitas, keutuhan dan konsistensi dari seseorang sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi. Identitas menunjukkan menjadi lain dan terpisah dari orang lain, namun menjadi diri yang utuh dan unik. Pencapaian identitas diperlukan untuk hubungan yang intim karena identitas seseorang diekspresikan dalam berhubungan dengan orang lain.

##### **2. Citra tubuh**

Citra tubuh membentuk persepsi seseorang tentang tubuh, baik secara internal maupun eksternal. Persepsi ini mencakup perasaan dan sikap yang ditujukan pada tubuh. Citra tubuh dipengaruhi oleh pandangan pribadi tentang karakteristik dan kemampuan fisik dan oleh persepsi dari pandangan orang lain. Citra tubuh juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kognitif dan perkembangan fisik, sikap, nilai cultural dan sosial.

### 3. Harga diri

Harga diri berdasarkan pada factor internal dan eksternal. Harga diri dapat dipahami dengan memikirkan hubungan antara konsep diri seseorang dan diri ideal. Diri ideal terdiri atas aspirasi, tujuan, nilai dan standar perilaku yang diupayakan untuk dicapai. Evaluasi diri adalah proses mental yang berkelanjutan. Nilai-nilai atau harga diri adalah kebutuhan dasar manusia yang dipengaruhi oleh sejumlah control yang mereka miliki terhadap tujuan dan keberhasilan dalam hidup.

### 4. Peran

Peran mencakup harapan atau standar perilaku yang telah diterima oleh keluarga, komunitas dan kultur. Perilaku didasarkan pada pola yang ditetapkan melalui sosialisasi. Sosialisasi itu sendiri dimulai tepat setelah lahir, ketika bayi berespons terhadap orang dewasa dan orang dewasa berespons terhadap perilaku bayi. Anak belajar perilaku yang diterima oleh masyarakat melalui proses berikut :

- a. Reinforcement-extinction : perilaku tertentu menjadi umum atau dihindari, bergantung apakah perilaku ini diterima dan diharuskan atau tidak diperbolehkan dan dihukum.
- b. Inhibisi : seorang anak belajar memperbaiki perilaku, bahkan ketika berupaya untuk melibatkan diri mereka.
- c. Substitusi : seorang anak menggantikan satu perilaku dengan perilaku lainnya, yang memberikan kepuasan pribadi yang sama
- d. Imitasi : seorang anak mendapatkan pengetahuan, keterampilan atau perilaku dari anggota social atau kelompok cultural.

- e. Identifikasi : seorang anak menginternalisasikan keyakinan, perilaku, dan nilai dari model peran ke dalam ekspresi diri yang unik dan personal.

Selama sosialisasi, seorang anak umumnya mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dalam banyak peran yang berbeda. Sosialisasi yang tidak berhasil adalah ketidakmampuan untuk berfungsi seperti yang dapat diterima oleh nilai masyarakat.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri adalah sebagai berikut :

1. Tingkat perkembangan dan kematangan

Perkembangan anak seperti dukungan mental, perlakuan dan pertumbuhan anak akan mempengaruhi konsep dirinya.

2. Budaya

Dimana pada usia anak-anak nilai-nilai akan diadopsi dari orang tuanya, kelompoknya dan lingkungannya. Orang tua yang bekerja seharian akan membawa anak lebih dekat pada lingkungannya.

3. Sumber eksternal dan internal

Dimana kekuatan dan perkembangan pada individu sangat berpengaruh terhadap konsep diri.

4. Pengalaman sukses dan gagal

Ada kecendrungan bahwa riwayat sukses akan meningkatkan konsep diri demikian pula sebaliknya.

## 5. Stresor

Stresor menantang kapasitas adaptif seseorang. Selye (1956) menyatakan bahwa stres adalah kehilangan dan kerusakan normal dari kehidupan, bukan hasil spesifik tindakan seseorang atau respon khas terhadap sesuatu. Proses normal dari kematangan dan perkembangan itu sendiri adalah stresor. Stresor konsep diri adalah segala perubahan nyata atau yang diserap yang mengancam identitas, citra tubuh, harga diri, atau perilaku peran.

### a) Stresor identitas

Identitas didefinisikan sebagai pengorganisasian prinsip dari system kepribadian yang bertanggung jawab terhadap kesatuan, kontinuitas, keunikan, dan konsistensi dari kepribadian. Identitas dipengaruhi oleh stresor seumur hidup.

Bingung identitas terjadi ketika seseorang tidak mempertahankan identitas personal yang jelas, konsisten, dan terus sadar. Kebingungan identitas dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan jika seseorang tidak mampu mengatasi stresor identitas. Dalam stress ekstrem seorang individu dapat mengalami depersonalisasi, yaitu suatu keadaan dimana realitas internal dan eksternal atau perbedaan antara diri dan orang lain tidak dapat ditetapkan.

### b) Stresor citra tubuh

Perubahan dalam penampilan, struktur atau fungsi bagian tubuh akan membutuhkan perubahan dalam citra tubuh. Makna dari kehilangan fungsi atau perubahan dalam penampilan dipengaruhi oleh persepsi individu tentang perubahan yang dialaminya. Citra tubuh terdiri atas elemen ideal

dan nyata. Seorang wanita yang memasukkan payudara sebagai citra tubuhnya dalam elemen ideal, maka kehilangan payudara akibat mastektomi dapat menjadi perubahan yang signifikan. Makin besar makna penting dari tubuh atau bagian spesifik, maka makin besar ancaman yang dirasakan akibat perubahan dalam citra tubuh.

c) Stresor harga diri

Harga diri adalah rasa dihormati, diterima, kompeten dan bernilai. Banyak stresor mempengaruhi harga diri seorang bayi, usia bermain, prasekolah dan remaja. Ketidakmampuan untuk memenuhi harapan orang tua, kritik tajam, hukuman yang tidak konsisten, persaingan antara saudara sekandung, dan kekalahan yang berulang dapat menurunkan tingkat nilai diri. Stresor pada orang dewasa mencakup ketidakberhasilan dalam pekerjaan dan kegagalan dalam hubungan.

d) Stresor peran

Peran membentuk pola perilaku yang diterima secara sosial yang berkaitan dengan fungsi seorang individu dalam berbagai kelompok sosial. Sepanjang hidup orang menjalani berbagai perubahan peran. Perubahan normal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan maturasi mengakibatkan transisi perkembangan.

Masing-masing dari transisi dapat mengancam konsep diri yang mengakibatkan konflik peran, ambiguitas peran atau ketegangan peran.

1) Konflik peran

Konflik peran adalah tidak adanya kesesuaian harapan peran. Jika seseorang diharuskan untuk secara bersamaan menerima dua peran

atau lebih yang tidak konsisten, berlawanan, atau sangat eksklusif maka dapat terjadi konflik peran. Terdapat tiga jenis dasar konflik peran yaitu :

- a. Konflik interpersonal terjadi ketika satu orang atau lebih mempunyai harapan yang berlawanan atau tidak cocok secara individu dalam peran tertentu.
- b. Konflik antar-peran terjadi ketika tekanan atau harapan yang berkaitan dengan satu peran melawan tekanan atau harapan yang saling berkaitan.
- c. Konflik peran personal terjadi ketika tuntutan peran melanggar nilai personal individu.

## 2) Ambiguitas peran

Ambiguitas peran mencakup harapan peran yang tidak jelas. Ketika terdapat ketidakjelasan harapan, maka orang menjadi tidak pasti apa yang harus dilakukan, bagaimana harus melakukannya, atau keduanya.

## 3) Ketegangan peran

Ketegangan peran adalah perpaduan antara konflik peran dan ambiguitas peran. Ketegangan peran dapat diekspresikan sebagai perasaan frustrasi ketika seseorang merasakan tidak adekuat atau merasa tidak sesuai dengan peran.

Kelebihan beban peran terjadi ketika seseorang individu tidak dapat memutuskan tekanan mana yang harus dipatuhi karna jumlah tuntutan yang banyak dan konflik prioritas.

6. Usia, keadaan sakit dan trauma

Dimana usia tua dan keadaan sakit akan memengaruhi persepsi seseorang.

### **2.1.5 Pengertian *Civic Knowledge***

Kata kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang harus dikuasai seseorang peserta didik warga negara (*civic knowledge*) merupakan komponen-komponen utama kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang merupakan tujuan civic education sebagaimana dirumuskan *The National Standard for Civic and Government (Center for Civic Education, 1994)* meliputi pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), kecakapan warga negara (*civic Skills*), dan watak-watak warga negara (*civic disposition*).

Pengetahuan warga negara berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Baik dalam *National Standards dan Civics Framework for the 1998 National Assesment of Educational Progres (NAEP)* (Branson, 1999:9). Komponen pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang terus menerus diajukan yaitu: 1) Apa kehidupan Kewarganegaraan, politik dan pemerintahan ?; 2) Apa fondasi-fondasi sistem politik ?; 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi ?; 4) Bagaimana hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain di dunia ?; 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Skill kewarganegaraan dan pengetahuan warga negara adalah komponen utama dalam proses persepsi informasi dan mencoba untuk menentukan pengaruh yang berbeda dalam keterlibatan warga negara. (dalam jurnal *Developing Citizenship*



*competencies from Kindergarten Through Grade 12: A background Paper for Polceymakers and Educators, 2006).*

PKn memuat pengetahuan warga negara yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian PKn menyajikan fakta, konsep, generalisasi, dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. PKn hendaknya memperhatikan konsep-konsep kunci yang menjadi elmen inti dari PKn atau “*Essensial elements of Citizenship Education*” (*Qualifications and Curriculum Authority-QCA, 1998:44*) sebagai berikut: 1) *Demokracy and Authocracy*; 2) *Coopration and Conflict*; 3) *Equality and Diversity*; 4) *Fairness Justice, the rule of law, rules, laws and human rights*; 5) *Fredoom and order*; 6) *Individual and community*; 7) *Power and authority*; 8) *Righths and responsibility*.

Berdasarkan pandangan QCA tersebut, konsep kunci yang harus dikembangkan dalam PKn meliputi demokrasi dan authokrasi, kerjasama dan konflik, persamaan dan perbedaan, keadilan, rule of law, peraturan, hukum dan hak asasi manusia, kebebasan dan keteraturan, individu dan masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, hak dan kewajiban warga negara.

Sementara itu dalam kurikulum 2006 konsep-konsep kunci yang harus dikembangkan melalui PKn meliputi peraturan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, demokrasi dan sistem politik, Pancasila, dan Globalisasi.

Komponen esensial kedua *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan warga negara (*civic skills*). Jika warga negara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan yang diuraikan diatas, namun mereka perlu memiliki keterampilan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Keterampilan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seorang harus paham dahulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu.

Keterampilan-keterampilan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut kemampuan berpikir kritis. *The National Standards for Civics and Government* dan *The Civics Framework for 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai keterampilan-keterampilan ini sebagai kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi, menjelaskan dan menganalisis, dan mengevaluasi, mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu politik.

Pengembangan dimensi *civic skill* dilandasi oleh *civic knowledge*. Dimensi *civic skill* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan:” ...*the knowledge and skill required to participate effectively, practical experience in participation designed to foster among students a sense of competence and efficacy*”, dan

mengembangkan “ ... *an understanding of the importance of citizen participation*” (Quigley, Buchanan dan Bahmuller, 1991:39), artinya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya peran serta aktif warga negara.

Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan “ *A knowledge of the fundamental concepts, history, contemporary event, issues, and facts related to matter and capacity to apply this knowledge the situation; a disposition to act in accord with the traits of civic characters; and a commitment to the realization of the fundamental values and principles*” (Quigley, Buchanan dan Bahmuller, 1991:39). Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa actual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warga negara.

Komponen mendasar ketiga dari *civic education* adalah watak warga negara (*civic dispositions*) yang mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak warga negara sebagaimana kecakapan warga negara, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter public yang tidak

kalah penting adalah kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses (Branson, 1999: 23-25).

Selanjutnya Branson (1999:23-25) menjelaskan secara singkat karakter publik dan privat dan diekpresikan sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar, menerima tanggung jawab akan konsekuensi dan tindakan yang diperbuat dan mematuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat demokratis.
- b. Memenuhi tanggung jawab personal warga negara dibidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini meliputi dan memelihara/menjaga diri, member nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, voting, membayar pajak, menjadi juri di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.
- c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara dan mengikuti aturan, prinsip mayoritas namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.
- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan

pilihan (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seorang warga negara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi kapan seorang karena kewajibannya atau perinsip-perinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.

- e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila ada kekurangan.

Kompetensi yang penting dimiliki warga negara tidak hanya dalam hal *civic knowledge* tetapi meliputi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Dalam mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition* memerlukan kurikulum yang tidak hanya didasarkan pada hapalan dan karangan, tetapi juga pada isi (*content*) yang berkaitan dengan proses pertanyaan penting dan mendasar. Hal tersebut menurut komisi nasional dalam jurnal *National Alliance for civic education* bahwa:

*“If democracy is to prosper in this new age, all Americans must possess the high levels of literacy and logic and the capacity to think critically and were once thought to be at the command of only a select few ... All will need a sense of go*

*history (of both the United States and the world), an understanding of government and democratic values, an appreciation of how the arts and literature explain the human condition and expand its possibilities. And, because they will be asked to decide complicated public questions (often with incomplete and conflicting information), as will need to be thoughtful observers of current events and be at ease with ambiguity”.*

Artinya bahwa di usia baru ini, semua orang Amerika harus memiliki tingkat keaksaraan dan logika serta kemampuan berpikir kritis yang baik. Semua akan memerlukan rasa sejarah (keduanya di Amerika Serikat dan dunia), pemahaman tentang pemerintahan dan nilai-nilai demokratis, sebagaimana apresiasi seni dan sastra menjelaskan kondisi manusia dan memperluas kemungkinan. Dan karena mereka akan diminta untuk memutuskan pertanyaan rumit publik (sering tidak lengkap dan bertentangan dengan informasi).

Ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut dapat dikembangkan dalam pembelajaran PKn yang efektif, yang mengembangkan kelas PKn sebagai laboratories demokrasi, dan senantiasa mengaitkan materi dengan konteks kehidupan siswa.

Ruang lingkup materi PKn sekarang ini, selain mempelajari masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, juga mengkaji masalah dalam kehidupan nyata. Tentu saja kondisi tersebut menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan masalah-masalah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bahan ajar yang harus disampaikan kepada siswa.

Menurut Depdiknas (2006: 2) aspek-aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. *Center for Civic Education* (CEE) maupun *Standardt and Civics Framwork for the 1998 National Assesment of Education* (NAEP) mengajukan 5 pertanyaan yang jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispotisions*). Kelima pertanyaan tersebut yaitu :

- a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?
- b. Apa fondasi – fondasi sistem politik ?
- c. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai – nilai dan prinsip – prinsip demokrasi ?
- d. Bagaimana hubungan negara dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah –masalah internasional ?
- e. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Tentang substansi pengetahuan kewarganegaraan ada beberapa pandangan yakni menurut CICED / *Center for Indonesian Civic Education* ( 2000 : 43), Menurut Pusat Pengujian Balitbang Diknas yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, yang juga dikembangkan dalam ToT ( *Training of Trainers*) Guru SLTP/MTs mata pelajaran PPKn Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas, dan Puskur (Pusat Kurikulum) atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), mengajukan substansi pengetahuan kewarganegaraan seperti dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Pengetahuan Kewarganegaraan**

<b>CICED</b>	<b>PUSIJIBANG</b>	<b>PUSKUR/KBK</b>
<i>1. principles of democracy</i>	1.Manusia sebagai zoon, Politicon	1. Persatuan Bangsa,
<i>2. comprehend of state Constitution</i>	2.Norma,Hukum, dan moral, Peraturan,	2. Nilai, norma dan
<i>3. citizen's rights anf Responsibility</i>	3.Norma-norma dalam masyarakat,	3.Hak Asasi Manusia (HAM)
<i>4. state's rule of law</i>	4.Bangsa dan Negara,	4. Kebutuhan Hidup,
<i>5. good government</i>	5.Konstitusi,	5. Kekuasaan dan Politik,
<i>6. citizenship</i>	6.Lembaga-Lembaga Politik,	6. Masyarakat Demokratis,
<i>7. people sovereignty</i>	7. Kewarganegaraan,	7. Pancasila dan Konstitusi Negara,



<i>8. free and fair tribune</i>	8. Sistem Politik Demokrasi,	8. Globalisasi.
<i>9. equality and equity</i>	9. Negara Hukum dan Penegakkannya,	
<i>10. justice</i>	10. Hak Asasi Manusia (HAM)	
<i>11. human rights</i>	11. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional	
<i>12. civilization</i>	12. Identitas Nasional.	
<i>13. cultural differences</i>		
<i>14. democratic processes</i>		
<i>15. citizenship activities</i>		
<i>16. national identity/ Attributes</i>		
<i>17. civil society</i>		
<i>18. free market economy</i>		
<i>19. political processes</i>		
<i>20. Separation/distribution Of power</i>		

**Tabel 2.2 Sebaran Materi Pokok Kewarganegaraan SLTP/ MTs dalam Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kurikulum 2004**

<b>Kelas VII</b>	<b>Kelas VIII</b>	<b>Kelas IX</b>
1. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah	1. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik	1. Pembelaan terhadap negara
2. Perundang-undangan Nasional	2. Budaya Demokrasi	2. Hukum dan Peradilan Nasional
3. Pancasila sebagai Ideologi Nasional	3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia	3. Instrumen Internasional
4. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	4. Konflik antar Bangsa dan Lembaga Internasional	4. Perlindungan Hukum
5. Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi		5. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Dengan memperhatikan aspek – aspek civic knowledge seperti dikemukakan dari berbagai pandangan di atas, maka dapat dinyatakan aspek – aspek tersebut pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

## 2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang masalah “Pengaruh Pembelajaran PKn, Konsep Diri dan Civic Knowledge terhadap Sikap Nasionalisme dan Patriotisme”. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang ingin dianalisis, baik mengenai peranannya, hubungannya, dan urgensi antara sikap penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia dan faktor-faktor yang berkorelasi dengan hal tersebut. Dari beberapa penelitian tentang sika nasionalisme dapat disebutkan sebagai berikut:

Isnadar. (2010) dalam penelitiannya yang berjudul : “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Iklim Kehidupan Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Siswa (Studi deskriptif analitik terhadap siswa SMP di kabupaten sumedang)” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh positif pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan karakter siswa terutama pada dimensi pengembangan materi pembelajaran.
2. Terdapat pengaruh positif iklim kehidupan keluarga terhadap pembentukan karakter siswa terutama pada dimensi keutuhan keluarga.
3. Terdapat pengaruh positif pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan iklim kehidupan keluarga terhadap pembentukan karakter disebabkan oleh adanya hubungan yang sinergi antara keduanya.
4. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa selain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan iklim kehidupan keluarga.

Dari penelitian di atas, ada yang memiliki persamaan judul maupun pembahasan yang akan dibahas dalam tesis yang akan peneliti tulis. Namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui sikap Nasionalisme dan Patriotisme peserta didik yang tertanam dalam diri siswa melalui peran kompetensi pedagogik PKn, konsep diri dan *civic knowledge*. Serta upaya dan hal apa saja yang dapat dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dalam mengembangkan sikap Nasionalisme dan Patriotisme pada peserta didik saat ini, yang kurang memperoleh perhatian karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai sikap Nasionalisme dan Patriotisme, peneliti merasa masih perlu melakukan kajian penelitian mengenai sikap Nasionalisme dan Patriotisme pada peserta didik di sekolah melalui upaya yang dilakukan guru Pkn khususnya dalam membina, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Pengembangan dan pembentukan sikap atau kepribadian siswa merupakan hal yang harus mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam lingkungan pendidikan formal maupun non formal dalam menghadapi perkembangan jaman dan arus globalisasi yang juga memberikan dampak negatif bagi kelangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa.

### **2.3 Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir secara umum dapat diartikan suatu gambaran tentang alur atau jalan pikiran si peneliti dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini

terdapat variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Sebagai variabel bebasnya adalah Kompetensi Paedagogik Guru PKn ( $X_1$ ), dan konsep diri ( $X_2$ ) *civic knowledge* ( $X_3$ ). Sebagai variabel terikatnya adalah sikap nasionalisme dan patriotisme peserta didik (Y).

### **2.3.1 Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru ( $X_1$ ) Terhadap sikap Nasionalisme dan Patriotisme peserta didik (Y)**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap evaluasi didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Ada 4 subkompetensi yang harus diperhatikan guru, yaitu memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan mengembangkan peserta didik. Sementara itu, merancang pembelajaran dimaksudkan guru harus mampu membuat RPP dan kemudian bisa mengaplikasikan rancangan itu dalam proses pembelajaran sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Di samping itu guru harus mampu melakukan evaluasi. Untuk lebih memahami cakupan kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran adalah pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, memahami karakteristik peserta didik karena karakteristik siswa yang berbeda-beda harus dipahami oleh guru sebagai tenaga profesional kependidikan. Perbedaan individual berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, keadaan individual siswa harus dimengerti oleh guru dalam upaya pembelajaran.

Maka peserta didik dapat menilai guru sewaktu mengajar apakah guru mampu melaksanakan interaksi pembelajaran?, apakah memiliki kemampuan

melaksanakan bimbingan belajar?, apakah guru mampu menimbulkan minat siswa?, apakah guru mengajar dengan tujuan yang jelas yang hendak dicapai dengan pengajarannya?, apakah guru menguasai bahan pelajaran sepenuhnya?, apakah guru cakap mengajukan pertanyaan terhadap siswa?, apakah guru cakap menilai pekerjaan siswa?, apakah peserta didik mengikutsertakan dalam proses belajar?.

Mengembangkan peserta didik bermakna bahwa guru mampu memfasilitasi peserta didik di dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimilikinya. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku sehari-hari. Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, trampil, memiliki semangat nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut untuk memiliki jiwa dan semangat nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang baik di lingkungannya.

Nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga, kecintaan alamiah terhadap tanah air, mengakui adanya dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, perasaan membela tanah air apabila dalam keadaan terancam, selalu berhubungan baik dan toleransi terhadap orang lain, memiliki rasa perduli, tepa selira, setia awan, dan cinta damai, peka dan perduli terhadap lingkungan, perduli terhadap masalah-masalah sosial, masalah kenegaraan baik nasional

maupun internasional.

Patriotisme adalah perasaan cinta tanah air dengan sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa dan negaranya.

Semangat nasionalisme dan patriotisme sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa agar setiap elemen bangsa bekerja dan berjuang keras mencapai jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa ini merupakan modal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa depan. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititikberatkan pada elemen-elemen strategis dalam percaturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, memahami karakteristik peserta didik karena karakteristik siswa yang berbeda-beda harus dipahami oleh guru sebagai tenaga profesional kependidikan.
- b. Perbedaan individual berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, keadaan individual siswa harus dimengerti oleh guru dalam upaya pembelajaran.
- c. Mengembangkan peserta didik bermakna bahwa guru mampu memfasilitasi peserta didik di dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimilikinya.
- d. Peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka peran Kompetensi Pedagogik Guru PKn sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan jiwa dan semangat rasa nasionalisme serta sikap bangga sebagai bangsa Indonesia pada diri peserta didik. Sehingga pengajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting setrategis di dalam menanamkan nilai-nilai karakter, sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme kepada peserta didik.

### **2.3.2 Pengaruh konsep diri ( $X_2$ ) Terhadap sikap nasionalisme dan patriotisme peserta didik (Y)**

Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya.

Konsep diri merupakan suatu gambaran dari apa yang kita pikirkan, bagaimana pendapat orang lain tentang diri kita, dan apa yang kita inginkan sehubungan dengan diri kita. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri bukan merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam hubungannya dengan individu lain. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu akan menerima tanggapan, selanjutnya akan dijadikan cermin untuk menilai dan

memandang dirinya sendiri. Jadi konsep diri terbentuk karena suatu proses umpan balik dari individu lain.

Dengan demikian konsep diri merupakan hal yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perilaku seseorang. Hal ini dapat dipahami karena konsep diri terbentuk berdasarkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman emosional individu mengenai dirinya sendiri. Konsep diri memiliki peran yang penting dalam menentukan perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri akan tampak dari perilakunya dalam pembentukan jiwa dan semangat rasa nasionalisme serta sikap bangga sebagai bangsa Indonesia pada diri peserta didik.

### **2.3.3 Pengaruh pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) (X<sub>3</sub>) Terhadap sikap nasionalisme dan patriotisme peserta didik (Y)**

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

*Center for Civic Education (CCE)* maupun *Standardt and Civics Framwork for the 1998 National Assesment of Education (NAEP)* mengajukan 5 pertanyaan



sebagai berikut:

1. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?
2. Apa fondasi – fondasi sistem politik ?
3. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai – nilai dan prinsip – prinsip demokrasi ?
4. Bagaimana hubungan negara dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah – masalah internasional ?
5. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Dari kelima pertanyaan tersebut jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Dengan demikian peran pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) mempunyai andil yang besar dalam pembentukan jiwa dan semangat rasa nasionalisme serta sikap bangga sebagai bangsa Indonesia pada diri peserta didik.

#### **2.3.4 Pengaruh Kompetensi Paidagogik Guru( $X_1$ ), Konsep diri ( $X_2$ ) dan Pengetahuan Kewarganegaraan *Civic Knowledge* ( $X_3$ ) Terhadap sikap nasionalisme (Y)**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap evaluasi didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya.

Konsep diri yang dimiliki individu dapat diketahui lewat informasi, pendapat, penilaian atau evaluasi dari orang lain mengenai dirinya. Individu akan mengetahui dirinya cantik, pandai, atau ramah jika ada informasi dari orang lain mengenai dirinya.

Sebaliknya individu tidak tahu bagaimana ia dihadapkan orang lain tanpa ada informasi atau masukan dari lingkungan maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung individu telah menilai dirinya sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri itu meliputi watak dirinya, orang lain dapat menghargai dirinya atau tidak, dirinya termasuk orang yang berpenampilan menarik, cantik atau tidak.

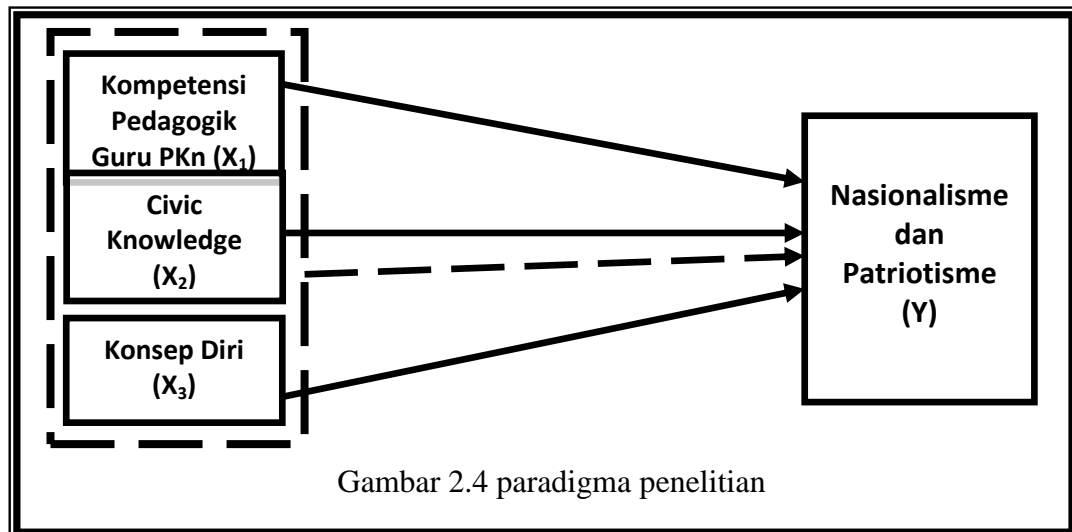
Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam

Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Secara umum sikap nasionalisme atau sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Baik buruknya sikap nasionalisme atau sikap bangga sebagai Bangsa Indonesia peserta didik akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah dari pembelajaran PKn, pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan lingkungan sosial. Pembelajaran PKn akan membawa perubahan tingkat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) pada individu yaitu dengan diperolehnya kemampuan dan kecakapan baru. Semangat nasionalisme dan patriotisme sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa agar setiap elemen bangsa bekerja dan berjuang keras mencapai jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa ini merupakan modal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa depan. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititikberatkan pada elemen-elemen strategis dalam perancangan global.

Dengan demikian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, konsep diri dan Kewarganegaraan (*civic knowledge*), akan sangat berpengaruh pada sikap nasionalisme dan patriotisme sebagai bangsa Indonesia .berpikirnya sebagai berikut :



Gambar 2.4 paradigma penelitian

Keterangan :

- = Pengaruh langsung  
 → = Pengaruh Ganda  
 X<sub>1</sub> = Pembelajaran PKn    X<sub>3</sub> = Civic Knowledge  
 X<sub>2</sub> = Konsep Diri        Y = Sikap nasionalisme dan Patriotisme

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pemecahan sementara atas masalah penelitian (Dalen dalam Ibnu Hajar, (1999 : 61). Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. H<sub>0</sub> :  $\rho_{y_1} = 0$  atau Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Paidagogik Guru PKn (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap sikap Nasionalisme dan patriotisme (Y).

$H_i : \rho_{y_1} \neq 0$  atau Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Paidagogik Guru PKn ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap sikap Nasionalisme dan patriotisme (Y).

2.  $H_0 : \rho_{y_3} = 0$  atau konsep diri siswa ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap sikap nasionalisme dan patriotisme ( $Y_2$ )

$H_i : \rho_{y_3} \neq 0$  atau konsep diri siswa ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap sikap nasionalisme dan patriotisme (Y)

3.  $H_0 : \rho_{y_2} = 0$  atau *Civic knowledge* ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap sikap Nasionalisme dan patriotisme (Y) siswa

$H_i : \rho_{y_2} \neq 0$  atau *Civic knowledge* ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap sikap Nasionalisme dan patriotisme (Y) siswa

4.  $H_0 : \rho_{13} = 0$  atau Kompetensi Paidagogik Guru PKn( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) ( $X_3$ ) peserta didik.

$H_i : \rho_{13} \neq 0$  atau persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik PKn, Konsep Diri, dan *Civic Knowledge* berpengaruh terhadap Sikap Nasionalisme dan Patriotisme siswa.